OPPORTUNITY IN CRISIS: AFFIRMATIVE ACTIONS UNTUK MENCIPTAKAN STRUKTUR EKONOMI YANG SEHAT DAN ADIL

M. Fadhil Hasan

Institute for Development of Economics and Finance

Struktur Ekonomi

- Dualisme ekonomi Indonesia dimana usaha kecil dominan dari sisi unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, sementara sumbangannya terhadap PDB relatif kecil. Sebaliknya dengan usaha besar.
- Struktur usaha dengan bentuk piramida dari sisi unit usaha, dan piramida terbalik dari sumbangan terhadap PDB sangat tidak sehat, karena keropos di tengah.
- Perlu transformasi ke arah struktur ekonomi belah ketupat dimana usaha menengah dominan dari sisi penyerapan tenaga kerja dan PDB ditopang oleh usaha besar dan kecil memiliki daya saing dan produktifitas yang tinggi.
- Strategi naik kelas dari usaha mikro ke kecil, dan kecil ke menengah merupakan strategi utama untuk menciptakan struktur ekonomi yang sehat.

STRUKTUR EKONOMI DUALISTIS

2006 2007

Unit Usaha 2006:

UK = 48.822.925 (99,77%)

72% Usaha Mikro:

UM = 106.711 (0,22%)

UB = 7.204 (0,01%)

Unit Usaha 2007:

UKM = 49.840.489 (99,99%)

UB = 4.527 (0,01%)

PDB 2006 (harga konstan 2000):

UK = Rp. 725,96 triliun (39,31%)

UM = Rp.306,61 triliun (16,60%)

UB = Rp. 814,08 triliun (44,08%)

PDB 2007 (harga konstan 2000):

UKM = Rp. 1.101,64 triliun (53,60%)

UB = Rp. 862,34 triliun (46,40%)

Tenaga Kerja 2006:

UK = 80.933.384 orang (91,14 %)

UM = 4.483.109 orang (5,05%)

UB = 3.388.462 orang (3.82%)

Tenaga Kerja 2007:

UKM = 91.752.318 orang (97,33%)

UB = 2.520.707 orang (2,67%)

Ekspor 2006:

UK = Rp. 30,30 triliun (3,89%)

UM = Rp. 91,90 triliun (11,81%)

UB = Rp. 485,20 triliun (80,30%)

Ekspor 2007:

UK = Rp. 35,51 triliun (4,98%)

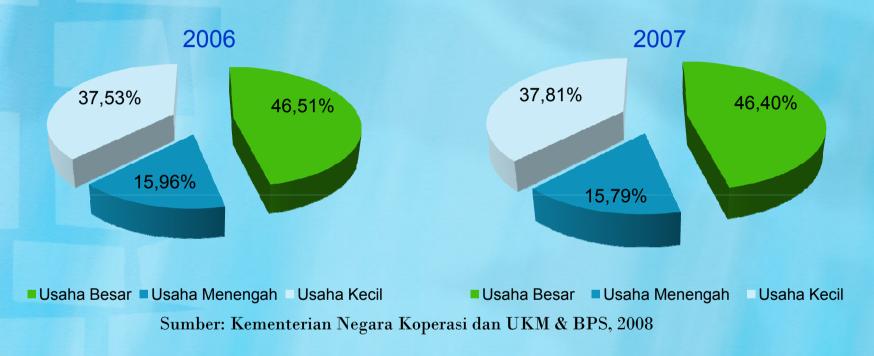
UM = Rp. 107,31 triliun (15,04%)

UB = Rp. 570,59 triliun (79,98%)

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UKM & BPS, 2008

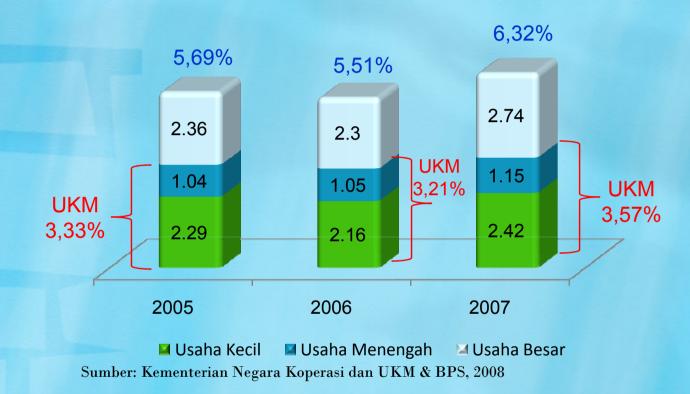
BEBERAPA INDIKATOR PERKEMBANGAN UKM

Peranan PDB Tahun 2006 dan 2007



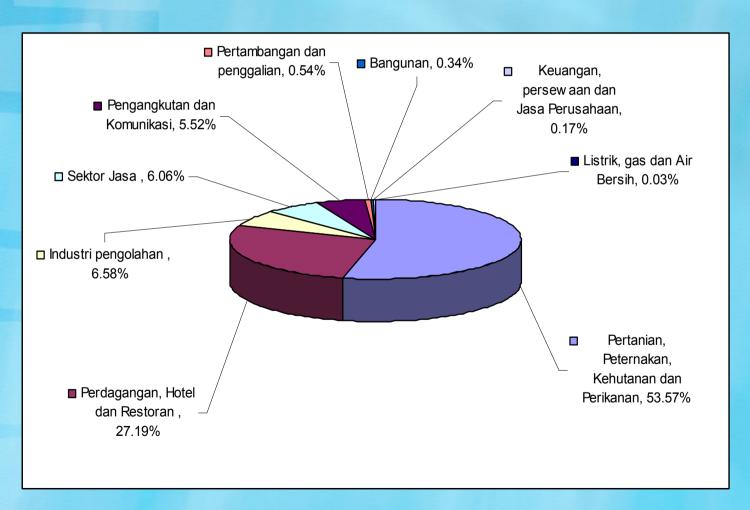
- ➤ Dari data BPS, pada 2007 nilai PDB UKM mencapai Rp 2.121,3 triliun meningkat sebesar Rp 335,1 triliun dari tahun 2006.
- ➤ Dari jumlah tersebut UKM memberikan kontribusi sebesar 53,6 persen dari total PDB Indonesia, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006 yangmencapai Rp 1.786,2 triliun atau 53,5 persen.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi 2005-2007 (persen)



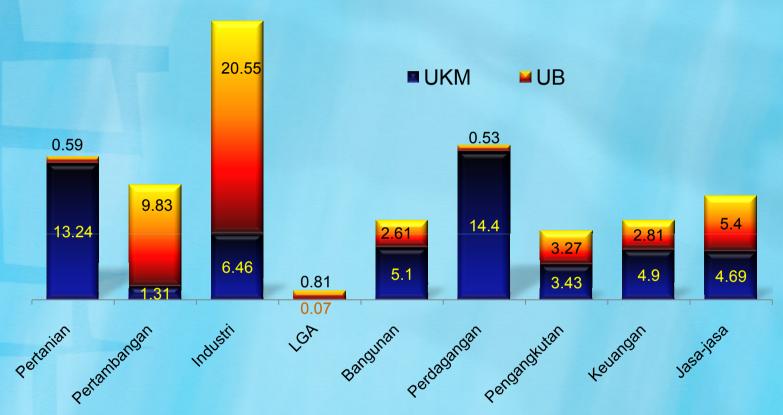
- ➤ Dari pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada 2007 sumbangan UK terhadap growth sebesar 2,42 persen, 1,15 persen berasal dari UM, dan UB menyumbangkan 2,74 persen.
- Ini menunjukkan sumbangan Kelompok UKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi cukup signifikan.

Pangsa Unit Usaha UMKM menurut Sektor Ekonomi:



Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UKM & BPS, 2006

Pangsa Produk Domestik Bruto UKM Tahun 2007 (persen)



Sumber: BPS, "Berita Resmi Statistik "No. 28/05/Th. XI, 30 Mei 2008

➤ Dari total kontribusi UKM terhadap PDB tahun 2007 yaitu sebesar 53,6% sebagian besar masih berasal sektor pertanian (13,24%) dan sektor perdagangan (14,4%), sedang kontribusi dari sektor industri masih didominasi oleh Usaha Besar (UB) yakni sebesar 20,55%.

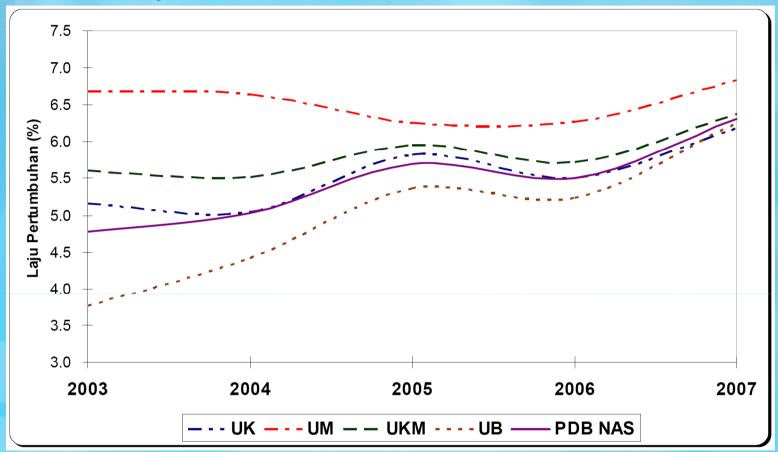
Struktur PDB Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2006-2007 (persen)

		Rata-rata 2006-2007					
LAPANGAN USAHA	Kecil	Menengah	UKM	Besar	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	86,90	8,85	95,75	4,25	100,00		
2. Pertambangan dan Penggalian	8,15	3,26	11,41	88,59	100,00		
3. Industri Pengolahan	12,55	11,35	23,90	76,10	100,00		
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,53	7,58	8,11	91,89	100,00		
5. Bangunan	44,94	21,12	66,06	33,94	100,00		
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	74,19	22,26	96,45	3,55	100,00		
7. Pengangkutan dan Komunikasi	27,93	25,03	52,96	47,04	100,00		
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Persh.	16,56	47,16	63,72	36,28	100,00		
9. Jasa-jasa	39,24	7,94	47,18	52,82	100,00		
PDB	37,67	15,88	53,55	46,45	100,00		

Sumber: BPS, 2008

- > secara sektoral UKM di Indonesia memiliki keunggulan dalam sektor tersier seperti perdagangan, hotel dan restoran dan bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam (pertanian, perkebunan, dll).
- > Sedangkan UB memiliki keunggulan dalam sektor padat modal seperti listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan.

Laju Pertumbuhan PDB UKM, 2003-2007



Sumber: BPS, "Berita Resmi Statistik "No. 28/05/Th. XI, 30 Mei 2008

- Meskipun dari gambar terlihat akselerasi pertumbuhan Usaha Menengah (UM) relatif lebih cepat dari kelompok usaha lain pada beberapa tahun terakhir tidak serta merta menjadikan UM sebagai kelompok yang memberikan sumbangan tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi,
- Ini dikarenakan peranan UM dalam penciptaan nilai tambah secara keseluruhan relatif kecil dibandingkan dengan kelompok usaha yang lain.

Nilai Investasi, 2006-2007

(miliar Rp)

Skala	200	06*	2007**		
Usaha	Nilai	Share (%)	Nilai	Share (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Kecil	164 778,04	20,46	204 808,96	20,82	
Menengah	205 848,51	25,55	257 202,69	26,14	
UKM	370 626,54	46,01	462 011,65	46,96	
Besar	434 843,77	53,99	521 811,11	53,04	
Total	805 470,31	100,00	983 822,76	100,00	

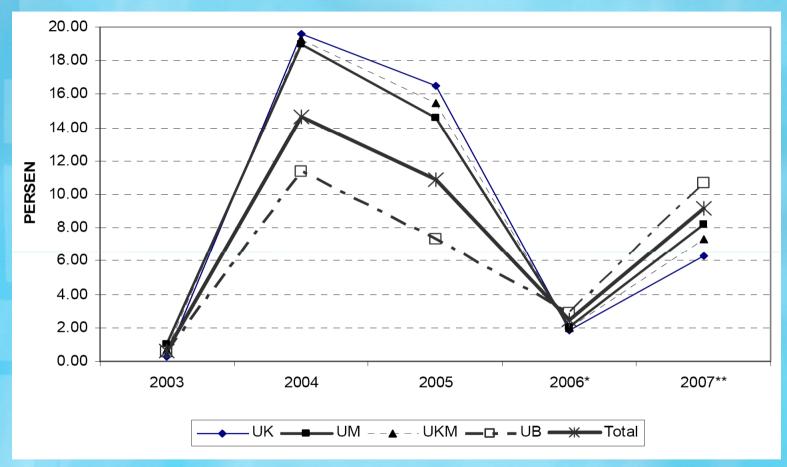
Sumber: BPS, "Berita Resmi Statistik "No. 28/05/Th. XI, 30 Mei 2008

➤ Bisa dikatakan daya serap investasi sektor UKM relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan UB yang memiliki share investasi lebih tinggi.

^{*} Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

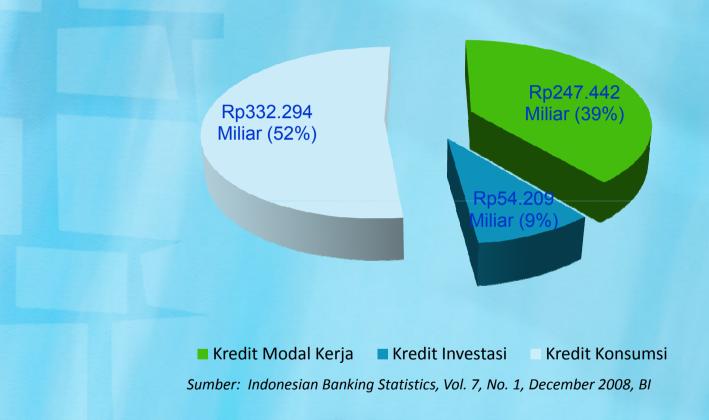
Laju Pertumbuhan Investasi UKM, 2003-2007 (persen)



Sumber: BPS, "Berita Resmi Statistik "No. 28/05/Th. XI, 30 Mei 2008

➤ Laju investasi sektor UKM sempat menurun pada 2004-2006, baru meningkat kembali pada 2007, namun dengan pola yang berubah, yakni UB lebih tinggi laju pertumbuhannya dibandingkan UK dan UM.

Komposisi Kredit UMKM (Desember 2008)



➤ Sedang dari sisi pembiayaan perbankan, sebesar 52% kredit UMKM tersalur pada sektor konsumsi, sisanya 39% masuk kredit modal kerja dan 9% kredit investasi.

PERANAN UMKM

• UMKM:

- Terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Ekonomi Nasional
 - Penyerapan Tenaga Kerja
 - Produk Domestik Bruto (PDB)
 - Nilai Ekspor
 - Jumlah Unit Usaha, dll.
- Terbukti Memiliki **Daya Tahan** terhadap Shock Ekonomi (Internal & External)
- Terbukti selalu menjadi **Katup Pengaman** ketika Perekonomian Nasional mengalami tekanan.

Mengapa UMKM Dapat Bertahan di Masa Krisis

- UMKM menghasilkan barang-barang konsumsi (pada umumnya)
- UMKM mengandalkan pembiayaan non perbankan (non banking financing)
- UMKM memiliki spesialisai produk yang ketat, memproduksi batang dan/atau jasa tertentu
- UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam berbagai aspe
- UMKM memiliki barrier to entry dan exit yang rendah
- UMKM justru berkembang saat krisis akibat banyaknya PHK di pada skala usaha besar dan formal.

Tabel: Skala Pemilikan Lahan Pertanian (1983 – 2003)

	Skala Kepemilikan Usaha Tani									
Kelompok		1983				199	93	2003		
1a	Luas han (ha)		saha ii (%)		ta-rata luas ahan	Usaha tani (%)	Rata- rata luas lahan	Usaha tani (%)	Rata-rata luas lahan	
	< 0.5		40.8		0.26	48.5	0.17	55.11	< 0.5	
0	.5 – 1.99		44.9		0.94	39.6	0.9	33.29	0.5-1.99	
2	.0 - 4.99		11.9		2.72	10.6	3.23	6.4	2.0-2.99	
	> 5		2.4		8.11	1.3	11.9	5.06	> 3	

Catatan: terdapat perubahan skala luas lahan tahun 1983-1993 dengan 2003

Tabel 4.

Jumlah Rumah Tangga Gurem Menurut Kawasan

1983 – 2003

Tahun	JAV	WA	LUAR	Jumlah (RT)	
	(Ribu RT)	(%)	(Ribu RT)	(%)	(Ribu)
1983	7,304	77.83	2,081	22.17	9,385
1993	8,067	75.43	2,628	24.57	10,695
2003	9,842	74.26	3,411	25.74	13,253

Kesimpulan

- Meningkatnya proses marjinalisasi kepemilihan lahan. Data 10 tahunan tersebut menunjukkan bahwa persentase usaha tani yang mengusahakan lahan <0.5 Ha seiring dengan bertambahnya waktu semakin meningkat dari 40 persen pada tahun 1983 menjadi 55.11 persen. Rata-rata kepemilikan lahan untuk kelompok ini juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 1983 luas rataannya 0.26 ha, menurun menjadi 0.17 ha pada tahun 1993. Kondisi ini sungguh memprihatinkan. Kondisi yang ironis justru terjadi sebaliknya, dimana rataan luas lahan untuk kelompok >5 mengalami peningkatan dari 8.11 ha tahun 1983 menjadi 11.9 ha pada tahun 1993.
- Meningkatnya jumlah petani gurem. Jumlah petani gurem yang meningkat dari waktu ke waktu setidaknya juga mengindikasikan bahwa telah terjadi proses pemiskinan yang cukup sistematis di perdesaan. Rata-rata kepemilikan lahan petani khususnya di pulau jawa yang kurang dari 0.5 ha menimbulkan permasalahan tersendiri untuk dapat mengefisienkan pola produksi. Kepemilikan lahan yang sempit dan adanya kendala dalam mengakses berbagai input produksi inilah yang ditengarai sebagai salah satu penyebab menurunnya kesejahteraan masyarakat perdesaan. Hal ini memberikan efek berantai yang cukup panjang dalam proses keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi tuntutan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi mengakibatkan masyarakat di perdesaan tidak ada pilihan untuk menjual aset produktif mereka.

Pengembangan UMKM

- Sebagai upaya yang komprehensif, terencana dan sistematis dalam menciptakan struktur ekonomi belah ketupat
- Menjadi prioritas utama keseluruhan kebijakan dan program ekonomi pemerintah
- Mitos dalam pengembangan UMKM: UMKM bagian dari masalah sosial, permodalan merupakan satu-satunya kunci pengembangan UMKM, UMKM tidak sanggup menghadapi persaingan global
- Paradigma pengembangan berdasarkan prinsip-prinsip affirmative actions, competitive attitudes with rational protection, memiliki arah yang jelas, nurturing dan enforcing
- Prasyarat: aturan perundang-undangan yang memadai, kebijakan makroekonomi yang stabil, iklim usaha yang kondusif, koordinasi program yang baik.

• Malaysia:

- 1. Penyediaan dana khusus. Bank Negara Malaysia menyediakan lima jenis dana khusus buat UMKM.
- 2. Bantuan kolateral, BNM mendirikan badan usaha pemerintah yaitu Credit Guarantee Corporation (CGC).
- 3. Kebijakan perkreditan UMKM. BNM mengeluarkan kebijakan perkreditan agar perbankan bersedia mengucurkan kredit pada UMKM. Kebijakan ini bukan merupakan himbauan tetapi ditindaklanjuti dengan tindakan riil.
- 4. Penyediaan lembaga penunjang. Lembaga yang dibentuk BNM untuk pengembangan UMKM adalah *complaint unit*. Lembaga ini untuk menampung berbagai keluhan UMKM dengan tujuan agar dapat diselesaikan seketika. dan
- 5. Restrukturisasi kredit

• Cina:

- Pemerintah Cina membentuk bussiness development services untuk membantu SMEs dalam konsultasi informasi, pemasaran, pembiayaan, penjaminan kredit, bantuan teknis dan jasa
- 2. Pemerintah Cina mengeluarkan "SME Promotion Law" pada tahun 2002 yang bertujuan memberikan perlakuan yang adil dan kesejajaran (level playing fields) untuk SMEs
- 3. Pemerintah Cina mengeluarkan "Government Procourenment Law" pada tahun 2002 untuk melengkapi SME Promotion Law. UU ini mendorong masalah kontrak untuk SMEs dan mandat kepada bank di Cina sehingga bank mempermudah prosedur persetujuan kredit bagi SMEs yang mempunyai catatan (records) kredit yang baik.

• Cina:

- 4. Di sektor keuangan, pemerintah Cina menerapkan batas atas (ceiling) suku bunga untuk SMEs. Namun kebijakan ini sempat mendapat tentangan dari kalangan perbankan dan menurunkan insentif mereka untuk menyalurkan kredit ke SMEs, sehingga akhirnya perbankan Cina menaikkan ceiling rate-nya.
- 5. Dalam hal skema penjaminan kredit, credit guarantee schemes (CGSs) pertama kali diimplementasikan di daerah Shanghai dan Chongqing pada tahun 1992. Awalnya terdiri dari mutual guarantee funds (MGFs). Sementara itu, commercial guarantee companies (CGSs) pertama didirikan pada tahun 1994 di Sichuan dan Guangdong dan setelah tahun 1999 commercial guarantee agency (CGAs) telah didirikan di seluruh propinsi dan kabupaten di bawah sponsor pemerintah. Termasuk dalam skema tersebut adalah provincial credit re-guarantee agencies (PCGAs) dan municipal guarantee agencies (MCGAs)

• Korea:

- 1. Dukungan yang diberikan kepada SMEs di Korea terdiri dari tiga hal: bantuan teknis, pemasaran dan keuangan.
- 2. Pemerintah Korea mengadopsi beberapa bentuk program dalam rangka memberikan dukungan keuangan kepada SMEs
- 3. Sumber dukungan keuangan utama untuk SMEs di Korea adalah *SME Restructure Fund* yang didirikan pada tahun 1978
- 4. Selama tahun 1970-an, bank komersial milik pemerintah telah mengalokasikan 30 persen kreditnya untuk SMEs, sementara untuk bank lokal mencapai 70 persen.

• Korea:

- 5. Pada tahun 1980-an, terjadi pergeseran menuju sistem dukungan yang lebih kuat untuk SME. Banyak credit funds yang berorientasi kepada SME dibentuk untuk mendorong kegiatan yang kolektif dan kooperatif di antara SMEs. Selain itu untuk mengakses teknologi baru dan untuk membantu SMEs me-relokasi sebagian kegiatannya ke luar negeri. Di samping itu, baik bank komersial maupun rural bank disyaratkan untuk mengalokasikan kreditnya dengan persentase tertentu kepada SMEs. Insentif juga diberikan melalui kebijakan di sektor perpajakan
- 6. Pembentukan *subscontracting network* antara usaha skala besar dan usaha skala kecil

Langkah-langkah Alternatif:

- Penyempurnaan Regulasi Pemerintah
 - Regulasi pemerintah adalah hal yang sangat penting untuk memberikan payung hukum bagi programprogram pembiayaan dan pengembangan UMKM. UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM perlu dilengkapi dengan UU lain, misalnya UU tentang Persaingan Usaha Sehat yang secara spesifik mengatur tentang posisi UMKM sehingga UMKM mempunyai "level playing fields" yang sama dengan usaha skala besar.

• Langkah-langkah Alternatif:

- Program Sektor Perbankan
 - ➤ Bankable → "Proteksi" Suku Bunga
 - ➤ Non-Bankable →
 - ✓ menggunakan model penjaminan "Cash Collateral" dari instansi/lembaga yang ditunjuk dan
 - ✓ pola "Kemitraan" → misalnya dengan penggunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
 - ➤ Manfaat <u>cash collateral</u> adalah mendorong mitra binaan untuk dapat berhubungan dengan bank yang pada akhirnya setelah melalui beberapa tahap pembiayaan mereka dapat berhubungan sendiri dengan bank secara komersial tanpa dukungan pemerintah.
 - ➤ Pola <u>Kemitraan</u> memberikan manfaat pada proses pembelajaran internal bank dalam mengenal karakteristik debitur untuk meningkatkan customer base dan maupun pembelajaran eksternal ke nasabah dalam rangka mengenalkan mekanisme perbankan pada *unbankable customer*

- Langkah-langkah Alternatif:
 - Program Sektor Non-Perbankan
 - Lingkage Program antara LKM dengan lembaga keuangan bank baik bank konvensional maupun bank syariah.
 - Pembentukan Lembaga Pembiayaan Khusus untuk UMKM
 - ➤ Di Jepang misalnya pembiayaan melalui Japan Finance Corporation for Small and Medium Enterprise (JASME), the National Life Finance Corporation (NLFC), atau the Shoko Chukin Bank

Langkah-langkah Alternatif:

- Pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit
 - Mengingat sebagian besar skema pembiayaan masih melalui kredit, maka pemerintah perlu mengeluarkan secepatnya *credit guarantee schemes (CGSs)* dan mendirikan lembaganya untuk sektor UMKM.
- Pemberdayaan "Micro Syariah"
 - Sejalan dengan semakin berkembangnya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka pemberdayaan "micro syariah" untuk pembiayaan sektor UMKM menjadi sangat penting. Ini sekaligus sebagai alternatif pembiayaan yang tidak tergantung pada tingkat suku bunga, di mana selama ini pembiayaan UMKM selalu terkendala oleh fluktuasi tingkat suku bunga.

Reformasi Agraria

- Reformasi agraria merupakan aktivitas redistribusi lahan baik melalui bekerjanya mekanisme pasar atau kebijakan politik yang setidaknya akan mempunyai dua dampak turunan sekaligus yaitu produktivitas dan produksi pertanian serta distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.
- Hal tersebut perlu diikuti dengan berbagai usaha terkait terutama sekali membuka berbagai akses terhadap permodalan, teknologi dan juga pasar bagi masyarakat perdesaan.
- Tatanan kelembagaan untuk bekerjanya reformasi agraria ini perlu dipikirkan lebih lanjut, mengingat bahwa proses reformasi agraria itu sendiri memerlukan tahapan-tahapan pelaksanaan yang jelas dan terarah. Pengalaman negara-negara yang melaksanakan reformasi agraria seperti Taiwan dan Korea Selatan menunjukkan bahwa dukungan politik merupakan syarat perlu bagi keberhasilan kebijakan tersebut diimbangi dengan fokus kegiatan yang jelas.

Reformasi Agraria

- Pemberian kepastian hukum pertanahan
- Pemetaan, penertiban, dan penataan aset pertanahan
- Landreform dan redistribusi lahan serta pemberian akses tanah negara kepada masyarakat miskin
- Penetapan lahan abadi untuk kepentingan pembangunan pertanian.

